

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena *ageing population* telah menjadi isu strategis global yang memengaruhi struktur ekonomi, sosial, dan fiskal berbagai negara, termasuk Indonesia. Semua negara menghadapi tantangan yang semakin besar dalam mempersiapkan sistem kesehatan dan sistem perlindungan sosial agar mampu beradaptasi dengan perubahan struktur demografi yang ditandai oleh meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Kesiapan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan perawatan lansia dapat dipenuhi secara efektif dan berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan belanja publik dan kapasitas fiskal negara sehingga proses penuaan penduduk tidak menjadi beban yang dapat mengganggu keberlanjutan fiskal di masa depan (World Health Organization, 2025).

Di Indonesia transisi demografi menuju masyarakat menua mulai menjadi perhatian serius karena terjadi ketika tingkat pendapatan per kapita negara masih berada pada kategori berkembang. Peningkatan jumlah lansia diperkirakan akan mendorong kenaikan pengeluaran agregat kesehatan yang berimplikasi terhadap pelebaran defisit anggaran dan melemahnya keberlanjutan fiskal apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas penerimaan negara. Penelitian dalam Ekonomi Pembangunan menunjukkan bahwa *aging population* di Indonesia memiliki pengaruh terhadap efektivitas kebijakan fiskal serta meningkatkan ancaman terhadap stabilitas fiskal jangka panjang. Situasi ini semakin relevan di tengah ketidakpastian ekonomi global pasca pandemi,

meningkatnya tekanan pembiayaan kesehatan, serta peringatan lembaga internasional seperti IMF mengenai risiko fiskal akibat penuaan penduduk di berbagai negara. Oleh karena itu, analisis mengenai dampak *ageing population* dan pengeluaran agregat kesehatan terhadap keberlanjutan fiskal di Indonesia menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai kesiapan kebijakan fiskal nasional dalam menghadapi perubahan struktur demografi pada masa mendatang (Hardiyanti, 2025).

Indonesia saat ini telah memasuki era penuaan penduduk yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk lansia telah mencapai sekitar 12% atau sekitar 29 juta jiwa dari total penduduk Indonesia dan diproyeksikan terus meningkat hingga mencapai 20% pada tahun 2045 (Badan Pusat Statistik, 2025). Sejalan dengan itu, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes, dan stroke pada kelompok lansia terus meningkat sehingga kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan dan perawatan jangka panjang juga semakin besar. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan pengeluaran kesehatan pemerintah dan memberikan tekanan terhadap fiskal. Pada tahun 2025, pemerintah melalui peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) terus memperkuat implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup lansia sekaligus mempersiapkan sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan dalam menghadapi perubahan struktur demografi (Kemenkes, 2025).

Keberlanjutan fiskal merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemampuan pemerintah menjaga stabilitas keuangan negara secara berkelanjutan melalui pengelolaan penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan utang secara optimal. Dalam penelitian ini, keberlanjutan fiskal diproksikan menggunakan rasio utang pemerintah pusat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) karena indikator tersebut mampu menggambarkan kapasitas negara dalam memenuhi kewajiban fiskalnya tanpa menimbulkan risiko tekanan ekonomi pada periode mendatang. Rasio utang terhadap PDB juga menjadi ukuran yang umum digunakan oleh lembaga internasional seperti IMF dan World Bank dalam mengevaluasi kesehatan fiskal suatu negara. Berdasarkan data World Bank, rasio utang pemerintah pusat Indonesia terhadap PDB mengalami fluktuasi selama periode 2008–2022 (Baharin & Saad, 2018).

Pada tahun 2008 rasio utang tercatat sebesar 34,2% terhadap PDB, kemudian menurun menjadi sekitar 30,0% pada tahun 2009, sebelum kembali mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 45,3% pada tahun 2022. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara pasca krisis global dan pandemi *COVID-19* yang mendorong pemerintah melakukan ekspansi fiskal melalui peningkatan belanja kesehatan, perlindungan sosial, serta program pemulihan ekonomi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika utang pemerintah memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas fiskal dan kapasitas pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi nasional (Daviana, 2024).

Peningkatan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi perhatian penting karena berkaitan langsung dengan ruang fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan jangka panjang. Secara teoritis, peningkatan utang publik yang tidak diimbangi oleh penguatan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan keberlanjutan fiskal. Data World Bank menunjukkan bahwa setelah pandemi COVID-19, rasio utang pemerintah Indonesia meningkat cukup signifikan, dari 33,7% pada tahun 2019 menjadi 42,9% pada tahun 2020 dan kembali meningkat menjadi 44,4% pada tahun 2021. Peningkatan tersebut mencerminkan tingginya tekanan fiskal akibat lonjakan pengeluaran pemerintah, khususnya pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial (Sitanggang et al., 2024).

Fenomena *ageing population* diperkirakan akan semakin memperbesar tekanan terhadap APBN karena meningkatnya kebutuhan pembiayaan kesehatan, jaminan sosial, dan pelayanan publik bagi penduduk lanjut usia. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa keberlanjutan fiskal Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengendalikan akumulasi utang, menjaga keseimbangan primer, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, analisis mengenai pengaruh *ageing population* dan pengeluaran agregat kesehatan terhadap keberlanjutan fiskal menjadi relevan untuk memahami ketahanan fiskal Indonesia dalam menghadapi perubahan struktur demografi dan ketidakpastian ekonomi global (Kudrna et al., 2021).

Fenomena *ageing population* merupakan konsekuensi dari keberhasilan pembangunan manusia yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya tingkat fertilitas dalam jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan proporsi penduduk lanjut usia terus meningkat dan mengubah struktur demografi suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam penelitian ini, variabel *ageing population* diproksikan menggunakan rasio ketergantungan lansia karena indikator tersebut mampu menggambarkan besarnya beban ekonomi penduduk usia produktif dalam menopang kelompok usia lanjut. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rasio ketergantungan lansia merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia lanjut terhadap penduduk usia produktif yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia kerja harus menanggung sejumlah penduduk lansia. Data BPS menunjukkan bahwa rasio ketergantungan lansia Indonesia terus mengalami peningkatan selama periode 2008–2022. Pada tahun 2008 rasio ketergantungan lansia tercatat sekitar 13,72%, kemudian meningkat secara bertahap seiring bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa struktur demografi Indonesia mulai bergerak menuju fase *ageing society*, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk lansia meningkat secara signifikan dalam total populasi nasional (Marcheline et al., 2023).

Peningkatan rasio ketergantungan lansia di Indonesia juga diperkuat oleh pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia yang berlangsung cukup cepat dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan (Badan Pusat Statistik, 2025), jumlah penduduk lansia Indonesia pada tahun 2008 mencapai sekitar 19,5 juta jiwa atau sebesar 8,55% dari total penduduk. Jumlah tersebut terus meningkat hingga mencapai sekitar 29,3 juta jiwa pada tahun 2022 atau setara dengan lebih dari

10% populasi nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki era penuaan penduduk (*population ageing*) yang berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi dan fiskal dalam jangka panjang. Peningkatan jumlah penduduk lansia akan mendorong kenaikan kebutuhan pembiayaan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan sosial yang pada akhirnya dapat memperbesar tekanan terhadap anggaran pemerintah. Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir menjelaskan bahwa peningkatan *old-age dependency ratio* memiliki hubungan erat dengan peningkatan belanja publik dan risiko penurunan keberlanjutan fiskal, terutama di negara berkembang yang sedang mengalami transisi demografi. Oleh karena itu, fenomena *ageing population* menjadi isu strategis yang penting untuk dianalisis karena tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur penduduk, tetapi juga berimplikasi terhadap kapasitas fiskal negara dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka Panjang (Wei, 2025).

Pengeluaran agregat kesehatan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia karena mencerminkan kapasitas suatu negara dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam penelitian ini, variabel pengeluaran agregat kesehatan diproksikan menggunakan indikator *current health expenditure (% of GDP)* atau pengeluaran kesehatan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari World Bank. Indikator tersebut menunjukkan besarnya alokasi sumber daya ekonomi nasional yang digunakan untuk pembiayaan sektor kesehatan, baik yang berasal dari pemerintah, sektor swasta, maupun rumah tangga (Arini et al., 2024).

Secara teoritis, peningkatan pengeluaran kesehatan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan angka harapan hidup dan produktivitas tenaga kerja. Namun, di sisi lain, peningkatan belanja kesehatan yang terus meningkat juga dapat menimbulkan tekanan terhadap kapasitas fiskal negara apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara. Berdasarkan data World Bank, pengeluaran kesehatan Indonesia terhadap PDB mengalami tren meningkat selama periode 2008–2022. Pada tahun 2008, pengeluaran kesehatan Indonesia tercatat sekitar 2,3% terhadap PDB, kemudian meningkat menjadi 2,9% pada tahun 2015 dan mencapai puncaknya sebesar 3,7% pada tahun 2021 pada saat pandemi COVID-19. Setelah pandemi mulai mereda, angka tersebut kembali turun menjadi sekitar 2,7% pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor kesehatan menjadi prioritas penting dalam kebijakan pembangunan nasional, khususnya pada masa krisis kesehatan global (Ayu et al., 2022).

Peningkatan pengeluaran agregat kesehatan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur demografi dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Fenomena *ageing population* menyebabkan kebutuhan pembiayaan kesehatan meningkat karena kelompok lanjut usia cenderung memiliki tingkat konsumsi layanan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia produktif. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memperlihatkan pentingnya kapasitas fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem kesehatan nasional melalui peningkatan belanja kesehatan, pengadaan vaksin, subsidi layanan kesehatan, serta perlindungan sosial Masyarakat (Sitanggang et al., 2024).

World Bank mencatat bahwa lonjakan pengeluaran kesehatan Indonesia pada tahun 2020–2021 merupakan salah satu dampak dari ekspansi fiskal pemerintah dalam menghadapi krisis pandemi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan memiliki hubungan erat dengan keberlanjutan fiskal karena peningkatan belanja kesehatan yang berlangsung secara terus-menerus berpotensi memperbesar tekanan terhadap anggaran negara dan meningkatkan kebutuhan pembiayaan utang pemerintah. Sejumlah penelitian dalam lima tahun terakhir menjelaskan bahwa kenaikan pengeluaran kesehatan di negara berkembang memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas fiskal, terutama ketika diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk lansia dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, analisis mengenai pengaruh pengeluaran agregat kesehatan terhadap keberlanjutan fiskal menjadi penting untuk memahami sejauh mana peningkatan belanja kesehatan mampu dikelola secara optimal tanpa mengganggu stabilitas fiskal jangka panjang Indonesia (Bai & Lei, 2020).

Fenomena *ageing population* dan peningkatan pengeluaran agregat kesehatan memiliki keterkaitan yang erat terhadap keberlanjutan fiskal suatu negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia yang sedang mengalami transisi demografi. Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menyebabkan pemerintah menghadapi beban pengeluaran publik yang semakin besar, terutama pada sektor kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan sosial. Jumlah penduduk lansia Indonesia meningkat dari sekitar 19,5 juta jiwa pada tahun 2008 menjadi 29,3 juta jiwa pada tahun 2022, sementara rasio ketergantungan lansia juga mengalami peningkatan secara bertahap (Arini et al., 2024).

Data World Bank menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan Indonesia terhadap PDB meningkat dari sekitar 2,1% pada tahun 2008 menjadi 3,7% pada tahun 2021 sebelum turun menjadi sekitar 2,7% pada tahun 2022. Peningkatan belanja kesehatan tersebut beriringan dengan kenaikan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang mencapai sekitar 45,3% pada tahun 2022 akibat meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara. Secara empiris, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan struktur demografi dan peningkatan kebutuhan layanan kesehatan memiliki implikasi langsung terhadap kapasitas fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas anggaran negara. Oleh karena itu, fenomena *ageing population* dan peningkatan pengeluaran kesehatan dipandang sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan fiskal Indonesia dalam jangka Panjang (Ayu et al., 2022).

Secara teoritis, hubungan antara *ageing population*, pengeluaran agregat kesehatan, dan keberlanjutan fiskal dapat dijelaskan melalui peningkatan tekanan belanja publik yang muncul akibat bertambahnya populasi usia lanjut. Penduduk lansia cenderung memiliki tingkat konsumsi layanan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia produktif sehingga mendorong peningkatan pengeluaran kesehatan pemerintah secara berkelanjutan. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi memperbesar defisit fiskal dan meningkatkan ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan utang apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas penerimaan negara (Barrela et al., 2025).

Fakta empiris, menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki fase *ageing society* yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lansia di atas 10% dari total populasi nasional. Pada saat yang sama, peningkatan rasio utang pemerintah terhadap PDB pasca pandemi COVID-19 mencerminkan

semakin besarnya tekanan terhadap APBN akibat kebutuhan pembiayaan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional. Beberapa penelitian lima tahun terakhir menjelaskan bahwa peningkatan rasio ketergantungan penduduk lanjut usia dan pengeluaran kesehatan memiliki hubungan signifikan terhadap penurunan keberlanjutan fiskal, terutama pada negara berkembang yang memiliki keterbatasan ruang fiskal. Dengan demikian, analisis mengenai pengaruh *ageing population* dan pengeluaran agregat kesehatan terhadap keberlanjutan fiskal menjadi penting untuk memahami kemampuan pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah perubahan struktur penduduk dan dinamika ekonomi global (Kudrna et al., 2021).

Hubungan antara *ageing population*, pengeluaran agregat kesehatan, dan keberlanjutan fiskal di Indonesia menunjukkan keterkaitan yang semakin kompleks seiring berlangsungnya transisi demografi dan peningkatan kebutuhan pembiayaan publik. Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia menyebabkan pemerintah menghadapi tekanan belanja yang lebih besar, khususnya pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk lansia Indonesia meningkat dari sekitar 19,5 juta jiwa pada tahun 2008 menjadi sekitar 29,3 juta jiwa pada tahun 2022 atau mencapai lebih dari 10% total populasi nasional. Pada periode yang sama, rasio ketergantungan lansia juga mengalami peningkatan yang menunjukkan semakin besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif (Baharin & Saad, 2018).

Data (World Bank, 2025) menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan Indonesia terhadap PDB meningkat dari sekitar 2,1% pada tahun 2008 menjadi 3,7% pada tahun 2021 akibat tingginya kebutuhan pembiayaan kesehatan selama pandemi COVID-19. Peningkatan belanja tersebut berlangsung bersamaan dengan kenaikan rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB yang mencapai sekitar 45,3% pada tahun 2022. Secara empiris, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan struktur penduduk dan peningkatan pengeluaran kesehatan memiliki implikasi langsung terhadap kapasitas fiskal pemerintah dalam menjaga stabilitas anggaran negara dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional (Alshaikh et al., 2026).

Fenomena *ageing population* berpotensi menurunkan keberlanjutan fiskal melalui peningkatan belanja publik jangka panjang yang tidak selalu diimbangi oleh peningkatan penerimaan negara. Penduduk lansia cenderung memiliki tingkat konsumsi layanan kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia produktif sehingga mendorong peningkatan pengeluaran agregat kesehatan pemerintah secara berkelanjutan. Indonesia sedang memasuki fase *ageing society*, sementara pada saat yang sama ruang fiskal pemerintah menghadapi tekanan akibat peningkatan pembiayaan utang pasca pandemi. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap PDB dari sekitar 30% pada tahun 2009 menjadi lebih dari 45% pada tahun 2022 (Sari, 2023).

Peningkatan rasio ketergantungan lansia dan pengeluaran kesehatan memiliki hubungan signifikan terhadap pelemahan keberlanjutan fiskal, terutama pada negara berkembang yang sedang mengalami transisi demografi. Oleh sebab itu, analisis mengenai pengaruh *ageing population* dan pengeluaran agregat kesehatan terhadap keberlanjutan fiskal di Indonesia menjadi penting

untuk memberikan gambaran empiris mengenai kemampuan pemerintah menjaga stabilitas fiskal dalam menghadapi peningkatan kebutuhan sosial masyarakat dan dinamika ekonomi global di masa mendatang (Daviana, 2024).

Peningkatan kualitas kesehatan dan angka harapan hidup merupakan indikator keberhasilan pembangunan yang seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam kondisi empiris di Indonesia, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia justru menimbulkan tantangan baru terhadap keberlanjutan fiskal negara. Di satu sisi, pemerintah dituntut meningkatkan pengeluaran kesehatan dan perlindungan sosial guna memenuhi kebutuhan populasi lansia yang terus bertambah, tetapi di sisi lain peningkatan belanja tersebut berpotensi memperbesar defisit anggaran dan meningkatkan rasio utang pemerintah terhadap PDB apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas penerimaan negara. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk lansia Indonesia hingga mencapai sekitar 29,3 juta jiwa pada tahun 2022, meningkatnya pengeluaran kesehatan terhadap PDB hingga 3,7% pada tahun 2021, serta kenaikan rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi sekitar 45,3% pada tahun 2022 (Daviana, 2024).

Peningkatan kualitas kesehatan dan angka harapan hidup merupakan indikator keberhasilan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan tantangan fiskal akibat meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah, khususnya pada sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Fakta empiris menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia Indonesia meningkat dari sekitar 19,5 juta jiwa pada tahun 2008 menjadi 29,3 juta jiwa pada tahun 2022, sementara pengeluaran kesehatan

terhadap PDB mencapai 3,7% pada tahun 2021 dan rasio utang pemerintah terhadap PDB meningkat hingga sekitar 45,3% pada tahun 2022.

Penelitian terdahulu masih menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh kedua variabel tersebut terhadap keberlanjutan fiskal, khususnya dalam konteks negara berkembang yang sedang mengalami transisi demografi seperti Indonesia. Menurut pandangan penulis, masih terbatasnya penelitian yang secara simultan mengkaji pengaruh *ageing population* dan pengeluaran agregat kesehatan terhadap keberlanjutan fiskal di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh *ageing population* dan pengeluaran agregat kesehatan terhadap keberlanjutan fiskal di Indonesia periode 2008–2022 guna memberikan bukti empiris serta menjadi masukan bagi perumusan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi fenomena penuaan penduduk.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan fakta empiris dan fenomena akademik pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *ageing population* berpengaruh terhadap keberlanjutan fiskal di Indonesia?
2. Apakah pengeluaran agregat Kesehatan berpengaruh terhadap keberlanjutan fiskal di Indonesia?
3. Apakah *ageing population* dan pengeluaran agregat kesehatan berpengaruh terhadap keberlanjutan fiskal??

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan target yang ingin dicapai peneliti untuk menjawab perumusan masalah di atas:

1. Untuk menganalisis pengaruh *ageing population* terhadap keberlanjutan fiskal di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran agregat kesehatan terhadap keberlanjutan fiskal di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh hubungan antara *ageing population* dan pengeluaran agregat kesehatan terhadap keberlanjutan fiskal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang lebih terarah baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu dalam bidang ekonomi pembangunan, khususnya terkait analisis empiris hubungan antara Ageing Population, pengeluaran kesehatan publik, dan keberlanjutan fiskal. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik berbasis data time series di Indonesia yang masih relatif terbatas dalam kajian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Ekonomi Pembangunan, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai hubungan antara ekonomi demografi dan kebijakan fiskal di negara berkembang.

a. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi empiris untuk penelitian lanjutan, khususnya yang berkaitan dengan *Ageing population*, pengeluaran publik, dan stabilitas fiskal.

b. Bagi Pembuat Kebijakan (Policy Maker)

Memberikan gambaran empiris mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan belanja kesehatan dan kapasitas fiskal negara dalam jangka panjang.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus, terarah, dan sesuai dengan pendekatan kuantitatif, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh *ageing population* dan pengeluaran agregat kesehatan terhadap keberlanjutan fiskal di Indonesia, sehingga tidak memasukkan variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, maupun penerimaan pajak yang juga berpotensi memengaruhi kondisi fiskal.
2. Variabel *ageing population* dalam penelitian ini dibatasi pada indikator rasio ketergantungan lansia di Indonesia.
3. Variabel pengeluaran agregat kesehatan diukur berdasarkan total pengeluaran kesehatan sebagai persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan data yang tersedia pada World Bank dan didukung oleh data kementerian keuangan.
4. Keberlanjutan fiskal dalam penelitian ini diproksikan menggunakan rasio utang pemerintah terhadap PDB (*debt to GDP ratio*), sehingga tidak mencakup indikator lain seperti defisit anggaran atau keseimbangan primer.

5. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahunan (*time series*) selama periode 2009–2023, sehingga hasil penelitian terbatas pada periode tersebut dan tidak mencerminkan kondisi di luar rentang waktu penelitian.
6. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada pendekatan *Regresi Linier Berganda*, sehingga hasil penelitian bergantung pada asumsi dan karakteristik model tersebut.